

## **Evaluasi Manajemen Berbasis Sekolah Menggunakan Model CIPP di SD Negeri 020 Galang Kota Batam**

**Raja Muhammad Sabri**

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

[tahtarajaku@gmail.com](mailto:tahtarajaku@gmail.com)

**Ayi Darmana**

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

[ayi.darma@gmail.com](mailto:ayi.darma@gmail.com)

**Maman Rumanta**

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

[maman.rumanta@gmail.com](mailto:maman.rumanta@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mana selama ini masih kurang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah yang lebih baik dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan proses pembelajaran. Model yang dijadikan dasar evaluasi manajemen berbasis sekolah dalam penelitian ini adalah model CIPP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: konteks, input, proses dan produk pada Manajemen Berbasis Sekolah. Penelitian ini melibatkan 153 orang, terdiri dari siswa-siswa kelas 4, 5, 6, guru dan wali murid di SD Negeri 020 Galang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Item angket yang diberikan telah dianalisis validitas konstruk dan empirik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) evaluasi konteks persentase yang diperoleh 58,95% termasuk kedalam kategori cukup baik, (2) evaluasi input, persentase 40,30% termasuk dalam kategori kurang baik, (3) evaluasi proses, dengan persentase 34,91 % termasuk kedalam kategori kurang baik, (4) evaluasi produk, dengan persentase 45,96% termasuk dalam kategori cukup baik. Tetapi, secara keseluruhan masih belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah di SDN 020 Galang Kota Batam belum berjalan maksimal, terutama dari aspek input dan proses.

**Kata Kunci:** Manajemen Berbasis Sekolah, Model CIPP, SDN 020 Galang

### **Abstract**

*The Indonesian government is making efforts to improve the quality of education, which so far is still lacking. To improve the quality of education in better school-based management requires community participation in decision making, supervising and assisting schools in the management and learning process. The model that is used as the basis for evaluating school-based management in this study is the CIPP model. The purpose of this study was to evaluate: context, inputs, processes and products in School-Based Management. This study involved 153 people, consisting of 4th, 5th, 6th grade students, teachers and guardians of students at SD Negeri 020 Galang. Data collection techniques using questionnaires, interviews, and observations. The questionnaire items given have been analyzed for construct validity and empirically. The results of this study indicate that (1) context evaluation, the percentage obtained is 58.95% including in the fairly good category, (2) input evaluation, the percentage of 40.30% is included in the poor category, (3) process evaluation, with a percentage of 34, 91% is included in the poor category, (4) product evaluation, with a percentage of 45.96% included in the fairly good category. However, overall it is still not optimal. It can be concluded that school-based management at SDN 020 Galang, Batam City has not run optimally, especially from the input and process aspects.*

**Keywords** School Based Management, CIPP Model, SDN 020 Galang

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mana selama ini masih dirasa masih kurang. Hingga muncul suatu pemikiran atau gagasan baru dalam pengelolaan pendidikan yang memberi kebijakan kepada masing-masing sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah. Pemikiran seperti ini yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Syukur (2011) berpendapat bahwa sekolah harus kreatif dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan mutu serta kualitas suatu pendidikan. Sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya perbaikan, salah satu upayanya adalah disempurnakannya sistem pendidikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah serta diikuti oleh Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip MBS pasal 52 (Depdiknas, 2001). Nurcholis (2003) berpendapat bahwa beberapa ciri-ciri sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berusaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mandiri, berwirausaha, bertanggung jawab, mampu mengontrol masukan terhadap manajemen dan sumberdaya serta kondisi, berkomitmen, dan lain sebagainya

Untuk meningkatkan manajemen berbasis sekolah yang lebih baik dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan proses pembelajaran (Mulyasa, 2012). Salah satu model yang dijadikan evaluasi manajemen berbasis sekolah adalah model CIPP. Model CIPP merupakan kepanjangan dari *context, input, process and product*. Model CIPP yang menitikberatkan pada evaluasi komponen-komponen yang ada dalam

program yang dievaluasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, pencapaian mutu pendidikan di SDN 020 Galang belum mencapai hasil maksimal, serta kesesuaian pengelolaan faktor input, proses, produk yang belum sepenuhnya menjalankan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pengelolaan MBS di SD Negeri 020 Galang.

SD Negeri 020 Kecamatan Galang Kota Batam berkeinginan untuk mengevaluasi penerapan MBS agar dapat memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut, namun saat ini penulis fokus pada dua standar yang dianggap sangat penting diteliti yaitu : 1) peserta didik dan 2) pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana konteks pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, (2) bagaimana input pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, (3) bagaimana proses pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, (4) bagaimana produk pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti ujian. Arikunto (2013) menyebutkan bahwa evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Arikunto (2013) membedakan model evaluasi menjadi tujuh, yaitu (1) *Goal Oriented Evaluation Model*, (2) *Goal Free Evaluation Model*, (3) *Formatif-Summatif Evaluation Model*, (4) *Countenance Evaluation Model*, (5) *CSE-UCLA Evaluation Model*, (6) *CIPP Evaluation Model*, dan (7) *Discrepancy Model*. Selanjutnya Arikunto (2013) juga mengungkapkan bahwa tahapan evaluasi program meliputi: tahapan persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan

evaluasi program, dan tahap monitoring pelaksanaan program. Widoyoko (2012) berpendapat bahwa evaluasi adalah hasil perolehan informasi yang digunakan sebagai bahan yang berguna untuk tercapainya tujuan-tujuan dari implementasi suatu keputusan terhadap fenomena. Sanders & Sullins (2006) berpendapat bahwa evaluasi program merupakan usaha yang dilakukan dengan cara sistematis yang bertujuan untuk menentukan kualitas suatu program, sehingga program tersebut dapat ditingkatkan. Sallis (1992) mengatakan bahwa evaluasi berfungsi untuk suatu pencegahan, dengan tujuan untuk menemukan suatu kebenaran dan kesalahan, dan dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product Model*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) mengungkapkan bahwa model evaluasi CIPP merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam & Shinkfield (1985) mengemukakan bahwa hasil evaluasi memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP terdiri dari: *context evaluation to serve planning decision, input Evaluation structuring decision, process evaluation to serve implementing decision, product evaluation to serve recycling decision.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konteks pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, mengevaluasi input pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, mengevaluasi proses pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam, mengevaluasi produk pada MBS di SD Negeri 020 Galang Kota Batam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif dengan

menggunakan model CIPP. Penelitian ini melibatkan 153 orang, terdiri dari siswa-siswa kelas 4, 5, 6, guru dan wali murid di SD Negeri 020 Galang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Data yang ada dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik SPSS 17.0 (uji validitas) dan deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SD Negeri 020 Kecamatan Galang Kota Batam beralamat di Jalan Bathin Sambang Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Dasar Negeri 020 Galang memiliki 9 tenaga pendidik atau guru termasuk kepala sekolah dan 1 orang tenaga kependidikan (penjaga sekolah). Kepala sekolah dan 2 guru telah menyandang sarjana (S1) termasuk penulis, sementara yang lain berkelulusan SLTA atau SMA sederajat dan sedang berkuliah di Universitas Terbuka. Seluruh tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 020 Galang merupakan putra-putri tempatan dan alumni dari sekolah tersebut kecuali penulis.

Sarana dan prasarana penunjang perlu dan wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, itu yang belum dapat terpenuhi seperti, ruang perpustakaan, laboratorium, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan visual, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran belum dimiliki oleh Sekolah Dasar Negeri 020 Galang secara utuh, termasuk sumber belajar berupa buku yang sangat terbatas. Masyarakat Pulau Abang terdiri 200 kepala keluarga yaitu 95 % berprofesi sebagai nelayan tradisional, 3% buruh dan 2 % pedagang kecil / lain-lain, 100 % ibu-ibu sebagai suri rumah tangga. Pendidikan rata-rata maksimal sampai tingkat Sekolah Dasar (SD/SMP) dan bahkan masih terdapat orang tua peserta didik yang belum mampu baca tulis.

## Hasil Analisis

### Hasil Evaluasi Konteks (Context)

**Tabel 1. Hasil Angket Evaluasi konteks (context)**

Komponen	Indikator	n
Konteks	Visi misi sekolah	552
	Kurikulum yang digunakan	474
	Dukungan Masyarakat	508
	Budaya Guru	335
	Peserta didik	386
<b>Jumlah</b>		<b>2255</b>

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\% = \frac{2255}{3825} \times 100\% = 58,95\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari evaluasi konteks diperoleh besaran persentasi 58,95%. Persentase tersebut termasuk ke dalam cukup baik. Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Nopember 2017 terhadap Komite sekolah (Irwansyah) SD Negeri 020 Galang menjelaskan, bahwa:

“Dalam penyusunan program kami pihak komite terlibat, namun karena kurang pahaman kami dalam menyusun program sekolah, kami hanya melimpahkan keputusan ini dengan pihak sekolah dalam menyusun program sekolah baik itu meliputi penyusunan visi misi sekolah maupun kurikulum sekolah. Ketidakmampuan kami dikarenakan kesibukan kami terhadap usaha memenuhi kebutuhan perekonomian kami yang sangat rendah.”

Sementara itu, Khairullazi guru kelas 6 SD Negeri 020 Galang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak guru dalam menyusun program sekolah melalui rapat majlis guru, yang mana seluruh guru dikumpulkan setiap awal tahun pelajaran untuk rapat dalam menyusun program sekolah bersama kepala sekolah, komite dan pihak guru, namun dalam hal ini kami sebagai guru beranggapan bahwa rumusan program sekolah merupakan wewenang kepala sekolah dalam menentukan kebijakan dalam memajukan sekolah. Sehingga setiap penyusunan program sekolah, kami lebih banyak diam dan

mendengarkan setiap keputusan, yang sudah dalam bentuk draf setengah jadi”.

Sedangkan Melati (Guru kelas 5), mengatakan bahwa:

“Selama ini sekolah kami dalam menyusun program visi misi dan kurikulum selalu mengikuti yang sudah tersedia, seperti visi misi dari dahulu sampai sekarang belum pernah ada perubahan, dan juga tidak dilakukan evaluasi terhadap visi misi, apakah berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah, kami beranggapan visi misi yang sudah ada itu baik dan perlu lagi diperbaiki, karena sudah selaras dengan tujuan sekolah dan relevansi kebutuhan masyarakat”.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penyusunan program kerja dan visi misi sudah melibatkan komite sekolah dan guru, walaupun belum maksimal. Hal ini penting agar seluruh *stakeholder* mengetahui program kerja dan visi misi sekolah, guna menjaga mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh Rukayah (2015) bahwa pada aspek konteks, MBS sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan Muhaimin (2003) mengungkapkan bahwa untuk mendukung adanya perubahan dan pertumbuhan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan suatu sekolah atau pendidikan, diperlukan reformasi kebijakan.

### Hasil Evaluasi Input

**Tabel 2. Hasil Angket Evaluasi Input**

Komponen	Indikator	n
Input	Usia	280
	Pendidikan prasekolah	336
	Jenjang Pendidikan Guru	232
	Latar Belakang Pendidikan Guru	245
	Pengalaman Mengajar Guru	249
	Peran orang tua terhadap peserta didik	394
	Peran orang tua terhadap sekolah	422
	<b>Total</b>	<b>2158</b>

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\% = \frac{2158}{5355} \times 100\% = 40,3 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari evaluasi input diperoleh besaran persentasi 40,3%. Persentasi tersebut termasuk kedalam kategori kurang baik.

Wawancara juga dilakukan peneliti kepada siswa dan siswi di SD Negeri 020 Galang, diantaranya Ananda Iqbal yang merupakan siswa SD Negeri 020 Galang kelas IV mengatakan bahwa:

“... Kami masuk sekolah waktu itu masih berusia 6,5 tahun, karena kami beranggapan badan kami sudah besar maka kami harus sekolah, dan juga orang tua kami menyuruh kami harus masuk sekolah” (wawancara tgl. 11 November 2017).

Hal senada diungkapkan Desi siswa kelas V SD Negeri 020 Galang, dalam wawancara bersama, bahwa:

“... kami masuk sekolah saat itu masih berumur 6 tahun, karena dilingkungan tempat tinggal kami anak-anak yang sudah berumur 6 tahun sudah masuk sekolah, jika berumur 7 tahun baru masuk sekolah itu sudah tua, teman-teman sebaya kami semuanya masuk sekolah sehingga kami iri kalau tidak sekolah” (wawancara tgl. 11 November 2017).

Hal tersebut diperkuat oleh Darwis yang merupakan wali murid siswa SD Negeri 020 Galang yang mengatakan bahwa:

“anak-anak Pulau Abang ini rata masuk sekolah berusia 6 tahun bahkan ada juga 5 tahun 8 bulan, ini sudah lumrah di Pulau Abang, kami beranggapan sekolah tu penting, tidak seperti kami yang tidak sekolah, jadi kami ingin anak kami masuk sekolah, tidak seperti kami sebagai nelayan. Dan juga lingkungan Pulau Abang anak-anaknya tidak begitu banyak, sehingga kalau tidak sekolah anak-anak kami ni tidak punya kawan di rumah” (wawancara tgl. 12 November 2017).

Hal senada diungkapkan oleh Jujuk yang merupakan wali murid SD Negeri 020 Galang bahwa:

“Usia anak sekolah itu tak wajib 7 tahun, yang penting anak kami mau sekolah, kalau tak sekolah mau jadi apa, kalau menunggu 7 tahun nanti sudah ketuaan”.

Semenara itu, Ledi Seman guru kelas 2 yang merangkap sebagai guru olahraga di SDN 020 Galang mengatakan bahwa:

“...sistem perekrutan tenaga input dilakukan sesuai JUKNIS yang ada. Kita sebenarnya tidak boleh melangkahi aturan yang ada pada JUKNIS. Misalnya untuk tenaga pendidik, penerimaan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan Dinas berdasarkan SK penempatan dan SK tugas yang berlaku. Tetapi untuk tenaga honorer analisis kebutuhannya dibuat sekolah dan diajukan kepada Dinas dan juga atas persetujuan komite, begitu pula untuk tenaga kependidikan. Karena Pulau Abang ini jauh dari Kota sehingga guru PNS tidak banyak yang mengajar di sini, sehingga kami sebagai anak tempatan merasa ingin jadi guru walaupun hanya berbekal ijazah SMA, dan juga sekarang kami diwajibkan untuk kuliah PGSD di UT, dan saya sekarang sudah semester 5” (wawancara tgl. 10 November 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Woro Sriyati, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dalam wawancara bersama peneliti mengatakan bahwa:

“...untuk pelaksanaan penerimaan tenaga pendidik berdasarkan JUKNIS yang ada, berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Kota Batam. Untuk guru PNS, langsung ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Tetapi sebelumnya dinas memberikan format data guru. Format itu berisikan kajian analisis kebutuhan tiap pendidik di sekolah. Format itu diberikan dua kali setahun. Untuk tenaga honorer, ditetapkan oleh sekolah sendiri berdasarkan kajian pada kebutuhan dan atas persetujuan komite sekolah. Setelah tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang diterima masuk di lembaga ini, maka mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah ke S1 dan juga diberikan kesempatan

mengikuti pelatihan tentang peningkatan kompetensinya agar kemampuannya meningkat terutama dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik” (wawancara tgl. 10 November 2017).

Pendapat tersebut menyatakan bahwa sebahagian besar siswa-siswa yang masuk ke SD Negeri 020 adalah siswa dengan usia dibawah 7 Tahun, sedangkan tenaga pendidik yang mengajar di SD Negeri 020 juga merupakan masyarakat pulau galang yang tidak sesuai dengan kualifikasi guru da nada beberapa pendidik yang tamatan SMA. Sehingga evaluasi input yang diperoleh kurang baik dan perlu adanya perbaikan MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020 Pulau Galang. Mulyasa (2012) juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan MBS yang lebih baik dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan proses pembelajaran. Uno (2010) juga mengungkapkan bahwa salah satu wewenang sekolah adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas manajemen berbasis sekolah.

### Hasil Evaluasi Proses

**Tabel 3. Hasil Angket Evaluasi Proses**

Komponen	Indikator	n
Proses	Kegiatan diluar sekolah	241
	Kegiatan pembelajaran	234
	Perencanaan Pembelajaran	268
	Pelaksanaan Pembelajaran	235,75
	Peran orang tua	356,5
	<b>Total</b>	

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\% = \frac{1335,25}{3825} \times 100\% = 34,91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari evaluasi proses diperoleh besaran persentasi 34,91%. Persentasi tersebut termasuk kedalam kategori kurang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Sumarni (Guru Kelas 1) mengungkapkan bahwa:

“... menurut saya proses pendidikan di SD Negeri 020 Galang berjalan baik dan

berpatokan pada SNP yang telah kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Semua lini kita perjuangkan dan kita gerakan supaya maksimal. Contohnya penggunaan kurikulum sebagai ‘jantung’ PBM di kelas, kita maksimalkan berupa persiapan panduan kurikulum, pelatihan guru dalam menghadapi kurikulum dan sampai pada pengawasan terhadap implementasi di kelas. Siswa juga dipersiapkan dan dilatih untuk menyesuaikan suasana baru dalam kurikulum yang terkadang berubah. Penggunaan sarana dan prasarana sebagai penunjang PBM dimaksimalkan walau belum memadai” (wawancara tgl. 10 November 2017).

Sementra itu, Woro Sriyati wakil kepala sekolah bagian kurikulum juga mengatakan bahwa:

“... PBM di SD Negeri 020 Galang menggunakan kurikulum 2013. Pelaksaaannya dimaksimalkan, mulai dari sosialisasi kepada guru dan siswa. Kurikulum sebagai kunci PBM dan dipersiapkan untuk nantinya menghasilkan output yang benar-benar bermutu” (wawancara tgl. 10 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatima Ayu, guru Kelas IV SD Negeri 020 Galang, menjelaskan bahwa:

“...Guru dalam mengajar harus menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media dan juga dalam mengajar harus mampu membuat siswa semangat dalam belajar. Tugas ini dijalankan untuk menyukkseskan tujuan pendidikan di lembaga ini, dimana guru wajib bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai mutu yang diinginkan. Namun karena kekurangan yang masih banyak terdapat dalam diri guru, baik dari segi pengalaman dan pengetahuan sehingga guru lebih banyak tidak menyiapkan pembelajaran. seperti dengan kesibukan kami sebagai istri seorang nelayan selain mengajar kami juga harus membantu suami untuk menambah penghasilan sebagai nelayan”. (wawancara tgl. 10 November 2017).

Husini Tanoyo, guru SBK SD Negeri 020 Galang, menjelaskan bahwa tugas guru sebenarnya harus lebih mendalam;

“...selain melaksanakan tugas pokok yang diembankan kepada para guru, seorang guru wajib bertugas sebagai orang tua, tempat para siswa mencurahkan isi hati, mengadu seluruh persoalan dan kesulitan hidupnya. Tugas ini wajib dimiliki semua guru agar lebih mendekatkan pelayanan personal kita kepada siswa. Tetapi kenyataannya selama ini dengan kurangnya bimbingan dan pelatihan yang kami peroleh sehingga guru hanya datang mengajar dan pulang, rutinitas inilah yang sering dilakukan, kami jarang melakukan bimbingan terhadap siswa”. (wawancara tgl. 10 November 2017).

Pernyataan ini juga dilengkapi oleh salah satu siswa kelas VI SD Negeri 020 Galang (Syukri), dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“...Guru dalam mengajar lebih banyak ceramah daripada praktek, guru jarang menggunakan media sehingga kami dalam belajar lebih banyak mendengarkan dari pada aktif, dan juga guru lebih banyak membiarkan siswa kalau ribut dalam kelas. Dalam hal lain kami jarang sekali mendapat bimbingan diluar jam sekolah, serta tidak adanya pengembangan minat dan bakat kami, sehingga kami kurang sekali prestasi (wawancara tgl. 10 November 2017)”.

Abel siswa kelas V SD Negeri 020 Galang mengatakan bahwa:

“...kurangnya kami mendapat bimbingan dalam belajar, apabila kami tidak paham dalam belajar, sehingga kami kalau tidak belajar, kami bercerita sesama teman, apalagi kalau pembelajaran gurunya sambil marah-marah. Kadang kami ditinggal di dalam kelas karena guru kami merajuk. Kami lebih banyak latihan dari pada praktek, guru jarang sekali menggunakan media, dan juga kami di rumah jarang sekali mendapat bimbingan dari orang tua, karena mereka jarang ada di rumah, pergi melaut”. (wawancara tgl. 10 November 2017)”.

Pak Runzi selaku wali murid mengatakan bahwa:

“...kurangnya kami membimbing anak kami di rumah hal ini di sebabkan kurang pemahannya kami terhadap pelajaran yang ada di sekolah (pelajaran sekarang sangat sulit) dan juga dengan jarangnyanya malam kami ada di rumah. Kami pergi melaut berangkat dari sore pulangnyanya baru pagi , sudah tidak sempat untuk mengajarkan anak kami karena kami harus tidur untuk persiapan melaut pada sore harinya. Sedangkan istri kami juga tidak pandai untuk mengajar anak kami, hal ini dikarenakan ketidakpahaman dengan pembelajarannya”. (wawancara tgl. 10 November 2017)

Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan SNP, namun keadaan tenaga pendidik yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai mengakibatkan terbatasnya keterampilan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran mengakibatkan hasil evaluasi proses termasuk kedalam kategori kurang baik. Hal tersebut juga kurang dukungan dari orang tua yang kurang membantu siswa dalam pengulangan pembelajaran dirumah, sehingga prestasi siswa rendah dan mutu pendidikan juga kurang baik. Hendaknya ada perbaikan manajemen sekolah melalui sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal senada juga disampaikan Rohiat (2009) bahwa manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Doringin (2019) mengatakan bahwa keuntungan pelaksanaan MBS salah satunya adalah guru dapat bertanggung jawab penuh dalam rencana pengembangan sekolah, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan maksimal.

**Hasil Evaluasi Produk****Tabel 4. Hasil Angket Evaluasi Produk**

Komponen	Indikator	n
Proses	Ketuntasan belajar	397
	Hasil ujian Sekolah	384,5
	Prestasi Akademik	276
	Kepribadian	381,6
	Paedagogik	268,5
	Profesional	354
	Sosial	365
	Peran masyarakat	386
	<b>Total</b>	

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\% = \frac{2812,6}{6120} \times 100\% = 45,96\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari evaluasi produk diperoleh besaran persentasi 45,96%. Persentasi tersebut termasuk kedalam kategori cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada wakil kurikulum SD Negeri 020 Galang Bapak Woro Sriyati mengatakan bahwa:

“...standar kelulusan di SDN 020 Galang ini mengikuti PERMEN yang telah ditetapkan pemerintah. Ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang mempersiapkan lulusan dengan baik. Setiap kompetensi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar berkualitas, tidak hanya pintar, tetapi memiliki sikap yang baik dan kemampuan yang handal”. (wawancara tgl. 10 November 2017).

“...semua program sekolah pasti diarahkan kepada tujuan yang sama, yakni mendapatkan lulusan yang bermutu. Termasuk MBS di dalamnya, sekolah berjuang, mandiri, terutama dalam pengembangan kurikulum pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, standar pengelolaan ditingkatkan, dan semua lini wajib berjuang untuk meningkatkan kelulusan yang ada” (wawancara tgl. 10 November 2017).

Bapak Ledi Seman kembali menjelaskan bahwa:

“...dalam mendesain kurikulum dalam PBM, hal yang menjadi tujuan utama adalah menghasilkan lulusan yang

bermutu. Semua kompetensi pada lulusan diperjuangkan agar menghasilkan kemampuan yang benar-benar handal. Karena kalau hanya salah satu kompetensi saja yang menonjol, berarti berarti lulusan itu belum seimbang. Seperti kenyataan sekarang ini, siswa belum paham betul tentang semua kompetensi yang harus mereka miliki. Terkadang hanya fokus di belajar mendapatkan nilai saja, tanpa mempedulikan sikap dan keterampilannya” (wawancara tgl. 10 Nopember 2017).

Guru kelas III SD Negeri 020 Galang mengatakan bahwa:

“...untuk hasil lulusan selama ini di sekolah ini secara keseluruhannya memang dilihat bagus dan memuaskan, tetapi secara pribadi mengalami penurunan prestasi. Ini juga kontribusi dari siswa itu sendiri yang kurang peka terhadap persiapan mereka”. (wawancara tgl. 10 November 2017).

Pendapat tersebut juga disimpulkan bahwasanya lulusan yang diperoleh masih belum sesuai dengan kompetensi yang di harapkan. Tercapainya tujuan MBS salah satunya adalah dengan meningkatnya kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensi. Sehingga dengan evaluasi ini dapat diketahui bagaimana perkembangan MBS yang terjadi di SD Negeri 020 Pulau Galang. Mulyati (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CIPP dalam hal: *Context*, karakteristik siswa, guru dan sarana dan prasarana secara umum sudah baik, *Input*, guru sudah memiliki rencana memadai, *Process*, secara umum terlaksana dengan baik dan *Product*, menunjukkan hasil baik. Penelitian yang dilakukan oleh Candra (2012) juga diperoleh bahwa evaluasi implementasi MBS sudah efektif. Penerapan CIPP untuk melakukan Evaluasi terhadap manajemen berbasis sekolah juga telah dilakukan penelitian oleh Aziz, Mahmood & Rehman (2018) dengan hasil bahwa model evaluasi CIPP dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, serta melatih guru untuk lebih berkualitas.



Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka penerapan model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) menurut Zhang *et al* (2011) merupakan suatu program yang bisa digunakan untuk merancang pembelajaran dan pengajaran evaluasi profesionalisme, sehingga dalam dunia pendidikan pelaksanaan MBS harus dilakukan guna perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah. Malen dkk (dalam Duhao, 2002) mengatakan bahwa secara konseptual Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu perubahan sebagai bentuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Zaresenjary & Khorami (2015) juga telah berpendapat bahwa model CIPP, efektif dapat menilai suatu rencana secara akurat sesuai dengan informasi-informasi pendukung untuk menentukan suatu keputusan yang diperoleh.

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) evaluasi konteks menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBS dibutuhkan oleh *stakeholder* sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Persentase yang diperoleh 58,95% termasuk kedalam kategori cukup baik. Program MBS tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah yaitu Pemberlakuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah dan PP19/2005:SNP Ps 49:1, tentang penerapan program MBS di setiap satuan pendidikan, (2) evaluasi input, persentase 40,30% termasuk dalam kategori kurang baik. Pada aspek input dalam pelaksanaan program MBS yang berasal dari sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kurang baik, dikarenakan jumlah maupun kualifikasi pendidikannya yang tidak sesuai, kurikulum yang penerapannya kurang sesuai untuk terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (3) evaluasi proses dengan persentase 34,91 % termasuk kedalam kategori kurang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum sesuai dengan yang diharapkan dari pelaksanaan MBS,

terutama pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran belum semua guru menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti yang direncanakan dalam implementasi MBS, (4) evaluasi produk (*Product*) dengan persentase 45,96% termasuk dalam kategori cukup baik. Tetapi, secara keseluruhan masih belum maksimal. Hal ini terkait dengan kualitas lulusan, guru dan hubungan dengan masyarakat yang masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, S, Mahmood, M. & Rehman, Z. (2018). Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study. *Journal of Education and Educational Development*, Volume 5 No. 1 Halamana 189-206
- Candra, I. W. (2012). *Studi Evaluatif Implementasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 3 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali*. Bali: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Depdiknas. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Doringin, F. (2019). Manajemen Berbasis Sekolah dan Keuntungannya. Diunduh 2 Februari 2020, dari situs World Wide Web: <https://pgsd.binus.ac.id/2019/07/15/manajemen-berbasis-sekolah-dan-keuntungannya/>
- Duhao. (2002). *School Base Management*. Diterjemahkan oleh Noryamin Aini, Suparto, dan Abas Al-Jauhari. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Mulyati, S. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013 dengan Model Context, Input, Proses, dan Product (CIPP) di Sekolah Menengah Pertama Rintisan Penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Wonogiri. Disertasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Muhaimin. (2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia
- Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis Madrasah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rohiat. (2009). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT. Refika
- Rukayah, B. I. (2015). Evaluasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang. *Jurnal Manajemen Pendidikan ISSN 2443-0544* Volume: 3, No. 2, 178-191.
- Sallis, E. (1992). *Total Quality Management in Education*. Philadelphia: Kogan Page.
- Sanders, J.R. & Sullins, C.D. (2006). *Evaluating School Programs*. (3rd ed). Thousand Oaks: Corwin Press
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A.J.(1985). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice*. Norwell, MA: Kluwer.
- Syukur, F. (2011). *Manajemen Berbasis pada Madrasah*. Jakarta: PT. Pustaka Riski.
- Uno, H. B. (2010). *Teori motivasi dan pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran*. FKIP UNS Surakarta: Surakarta.
- Zaresenjary E., N. S. Khorami. (2015). The Pathology of In-service Training Courses of Dezful's Elementary Schools Teachers Based on the CIPP Model. *International Journal On New Trends In Education And Literature*. 1(7): 31
- Zhang G., N. Zeller, R. Griffith, D. Metcalf, J. Williams, C. Shea, & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement* 15(4): 61-62